

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu keluarga dapat memenuhi semua kebutuhannya sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, sehat, dan produktif. Kondisi ini ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi, tersedianya tempat tinggal yang layak, akses terhadap pendidikan yang bermutu, serta layanan kesehatan yang memadai (Mulia & Saputra, 2020). Dalam penelitian Sukmasari & Putra (2020), kesejahteraan tidak hanya dinilai dari peningkatan pendapatan, melainkan juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Apabila dilihat dari aspek sosial, Kesejahteraan mencakup kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat terpenuhi sehingga mereka dapat menjalani kehidupan layak serta mengembangkan potensi diri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Aeda & Jannah, 2022). Sementara dilihat dari aspek ekonomi, kesejahteraan ekonomi ialah kemampuan individu maupun rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui pendapatan, pekerjaan, dan stabilitas ekonomi. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Namun, ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan kemiskinan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, upaya peningkatan kesejahteraan masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kemiskinan (Rahayu, 2023). Menurut Solissa et al (2025), kemiskinan dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya daya tahan ekonomi rumah tangga. Kemiskinan juga bersifat multidimensional sebab berakibat pada rendahnya mutu sumber daya manusia (Awaliyah, 2024).

Faktor-faktor kemiskinan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta rendahnya pendapatan, melainkan juga dari kondisi kesehatan, akses pendidikan, serta adanya perlakuan yang adil di hadapan hukum, yang dimana semua itu merupakan hal yang saling berkaitan (Ferezagia, 2018). Sebab peningkatan pendapatan akan memperkuat daya beli masyarakat, pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta kesehatan menunjang produktivitas individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Permata & Parianom, 2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan, dari 245,920 orang atau sekitar 11% pada tahun 2024 menjadi 229,640 orang atau sekitar 10,23% pada tahun 2025. Namun, pada saat yang sama garis kemiskinan justru meningkat, dari Rp. 475.046 perkapita perbulan tahun 2024, menjadi Rp. 491.604 pada tahun 2025 atau naik sebesar 3,49%. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, tetapi kenaikan garis kemiskinan justru meningkat, Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan dasar yang membuat sebagian masyarakat miskin justru semakin sulit keluar dari kemiskinan, sehingga ketimpangan di antara kelompok miskin cenderung meningkat.

Pada penelitian Daud & Marini (2018), menyatakan bahwa pemerintah perlu memiliki strategi untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terus meningkat dengan memberdayakan masyarakat miskin sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru (Mansir, 2020). Upaya tersebut sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama penghapusan kemiskinan, kehidupan Sehat dan Sejahtera, dan pendidikan berkualitas sebagai tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sendiri merupakan proses perubahan yang bertujuan menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat (Bakhri & Layaman, 2023). Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan baik dalam konteks global maupun nasional (Sari & Indrawati, 2021).

Sebagai bentuk implementasi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk

mengatasi kemiskinan melalui kebijakan publik, yaitu melalui Program Keluarga Harapan atau biasa dikenal sebagai PKH, dilaksanakan Kementerian Sosial (Nawir & Sinjai, 2022). Program ini merupakan bantuan sosial yang menggunakan mekanisme *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau bantuan bersyarat, dan dimulai sejak tahun 2007. Fokus utama program ini adalah peningkatan mutu sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan (Nova et al., 2018). Sejalan dengan kesejahteraan sosial, efektivitas program tidak hanya diukur dari pemberian bantuan tunai, tetapi juga dampaknya dalam memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta ekonomi KPM (Anggleni, 2018).

Dalam program ini, Keluarga penerima bantuan disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yakni keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Najidah & Lestari, 2024). KPM diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup secara bertahap dengan memanfaatkan bantuan yang diterima (Anisa et al., 2025). Sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa tujuan PKH adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan keluarga miskin, pembentukan perubahan perilaku, serta pencegahan kemiskinan berulang, sehingga penerima manfaat mampu keluar dari lingkaran kemiskinan (Sofianto et al., 2020). Upaya tersebut juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga stabilitas ekonomi (Wartoyo et al., 2024).

Pada konteks di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data dari kelurahan pada Desember 2025. Total 1.618 Kartu Keluarga (KK), tercatat bahwa sebanyak 816 KK atau lebih dari 50% berada pada kelompok desil 1 hingga 5. Secara rinci, jumlah tersebut terdiri dari 194 KK pada Desil 1 (sangat miskin), 144 KK pada Desil 2 (miskin), 150 KK pada Desil 3 (hampir miskin), dan 161 KK pada Desil 4 (rentan miskin), dan 161 KK pada Desil 5 (menengah bawah). Tingginya persentase kelompok tersebut menandakan bahwasanya sebagian besar masyarakat masih terdapat pada

tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah, dan juga cukup rentan terhadap perubahan kondisi sosial maupun ekonomi (Malta & Sutikno, 2019).

Keluarga pada desil 1-5 tersebut diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial, penerima bantuan PKH juga menjadi prioritas dalam memperoleh bantuan komplementer, seperti kartu indonesia pintar (KIP), kartu indonesia sehat (KIS), dan bantuan pangan non tunai (BPNT) (Damanik, 2020). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa PKH tidak sekadar berperan sebagai bantuan finansial, melainkan juga sebagai pintu masuk bagi keluarga miskin untuk mengakses berbagai layanan sosial lainnya.

Tabel 1. 1 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Sumber

No	Kelurahan/ Desa	Triwulan I (Jan–Mar)	Triwulan II (Apr–Jun)	Triwulan III (Jul–Sep)	Triwulan IV (Okt–Des)
1	Babakan	252	282	249	242
2	Sumber	312	355	313	336
3	Perbutulan	186	200	186	196
4	Kaliwadas	322	370	340	360
5	Pasalakan	506	606	543	563
6	Watubelah	395	409	376	379
7	Pejambon	273	299	262	253
8	Gegunung	522	415	482	475
9	Kemantren	251	259	243	247
10	Sendang	263	214	211	208
11	Tukmudal	229	268	218	232
12	Kenanga	183	191	165	168
13	Matangaji	819	817	534	436
14	Sidawangi	302	386	339	340
	Jumlah	4.815	5071	4.461	4.435

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, 2025

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2025, jumlah KPM di Kecamatan Sumber mengalami fluktuasi pada setiap triwulan.

Pada Triwulan I (Januari-Maret) tercatat sebanyak 4.851 KPM, kemudian meningkat pada Triwulan II (April-Juni) menjadi 5.071 KPM. Selanjutnya, jumlah tersebut mengalami penurunan pada Triwulan III (Juli-September) menjadi 4.461 KPM dan kembali menurun pada Triwulan IV (Oktober-Desember) menjadi 4.435. Perubahan ini menunjukkan bahwa jumlah penerima bersifat dinamis dengan pembaruan data yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan ketepatan sasaran program.

Namun demikian, terdapat permasalahan lain yang masih ditemukan, seperti kurang tepatnya penentuan sasaran dalam penyaluran bantuan. Kendala ini umumnya disebabkan oleh aspek administrasi serta pendataan yang belum sepenuhnya akurat, sehingga penyaluran PKH belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Terdapat ketimpangan dalam distribusi bantuan, khususnya bagi sebagian warga yang memenuhi kriteria kelayakan nyatanya tidak terdaftar, sementara pihak yang secara ekonomi lebih mampu tetap menjadi penerima manfaat program tersebut (Abizal & Yulindawati, 2022).

Di Kelurahan Sendang, jumlah KPM juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada setiap triwulan, yaitu dari 263 KPM pada Triwulan I menjadi 214 pada Triwulan II, 211 pada Triwulan III, dan 208 pada Triwulan IV. Penurunan dipengaruhi oleh proses pembaruan data dan juga menunjukkan bahwa terdapat adanya perbaikan kondisi pada sebagian masyarakat yang membutuhkan dukungan melalui program bantuan sosial PKH. Sejalan dengan penelitian Lolitasari & Marthalena (2025), Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mendukung akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima, khususnya dalam meringankan pengeluaran rumah tangga.

Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan. Karena sebagian KPM cenderung menggunakan bantuan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari dan tanpa mempertimbangkan penggunaan

untuk yang lebih produktif dan masih belum optimal dalam penggunaan, seperti biaya tidak langsung pendidikan (seragam, transportasi, dan perlengkapan sekolah) serta keterbatasan akses dan rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan (Rahmi & Liyana, 2023). Terlebih lagi adanya kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan, sebagian penerima lebih megandalkan bantuan dibandingkan berusaha untuk meningkatkan kondisi ekonominya, baik melalui pekerjaan maupun memanfaatkan peluang usaha (Ulum et al., 2024). Selain itu, terhambat oleh keterbatasan kemampuan KPM dalam mengelola keuangan rumah tangga secara tepat, sehingga manfaat program belum maksimal (Amalia et al., 2025).

Efektivitas PKH tidak sekadar didasarkan pada nominal bantuan yang disalurkan, namun sangat dipengaruhi akan kualitas pendampingan yang diberikan. Pendamping juga memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan program melalui pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat (R. N. Lestari et al., 2024). Keberhasilan PKH bukan hanya dinilai berdasarkan penurunan angka kemiskinan sementara, namun juga dari sejauh mana KPM mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan mencapai kemandirian (Komalasari, 2023).

Penelitian Andaniyati (2021) menegaskan bahwa kualitas pendamping menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas program. Sementara menurut pandangan Sasmito & Nawangsari (2019) menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antara pendamping dan peserta program merupakan kunci keberhasilan program, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dana dan perencanaan kebutuhan jangka panjang. Dalam hal ini, jika bantuan tanpa pembinaan maka akan berisiko menimbulkan ketergantungan dan pemanfaatan yang kurang produktif (Silviana & Chilmy, 2024). Pendamping memberikan edukasi keuangan, manajemen keuangan melalui kunjungan rutin dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) satu kali dalam setiap bulan (Hapsari & Chairani, 2025). Kegiatan ini bertujuan mendorong perubahan perilaku positif, meningkatkan kesadaran

KPM dalam memanfaatkan bantuan secara tepat, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga (Hidayatingsih & Sofa, 2025).

Menurut Rovidah et al (2026) menyatakan bahwa dalam proses pendampingan tersebut, KPM juga diarahkan untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan keluarga. Pendapatan yang sebelumnya banyak digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, yang sebenarnya sudah cukup terbantu oleh program PKH, kemudian didorong untuk dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih produktif. Dengan demikian sisa pendapatan yang ada dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha kecil, kegiatan ekonomi produktif, maupun berbagai aktivitas lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.

Namun kenyataannya, pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala. Hanya terdapat satu pendamping untuk seluruh KPM, Keterbatasan jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima menyebabkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi belum dapat dilakukan secara menyeluruh (Herlanda, 2025). Selain itu, rendahnya partisipasi KPM dalam mengikuti kegiatan P2K2 (Adnan et al., 2025). Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya proses penyampaian materi, motivasi, serta upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pendamping, sehingga informasi dan pengetahuan yang diberikan belum dapat diterima secara maksimal oleh KPM. Sehingga tujuan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas, mengubah pola pikir, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui program PKH belum dapat terealisasi dengan maksimal.

Berdasar kondisi tersebut, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan, serta kesehatan, yang diperkuat melalui kebijakan pemerintah seperti PKH. Meskipun kebijakan ini telah berkontribusi dalam mengoptimalkan akses layanan dasar, meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, pemanfaatan bantuan yang belum maksimal, keterbatasan pendamping, serta rendahnya keterlibatan KPM dalam proses pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian program belum

sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya hanya fokus menguji pengaruh bantuan sosial atau pendampingan secara parsial, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh keduanya secara simultan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh bantuan PKH dan pendampingan secara bersama-sama atau simultan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai judul **"Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pendampingan terhadap Kesejahteraan Sosisal Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas berikut teridentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Bantuan PKH belum dimanfaatkan optimal oleh sebagian KPM, terutama dalam pengelolaan dana bantuan.
3. Keterbatasan kemampuan KPM dalam mengelola keuangan rumah tangga secara tepat.
4. Adanya ketergantungan terhadap bantuan
5. Pendampingan terhadap KPM belum berjalan maksimal akibat keterbatasan jumlah pendamping, sehingga kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi belum efektif.
6. Rendahnya keterlibatan KPM dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas keluarga, khususnya dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dua variabel bebas, yaitu bantuan PKH dan pendampingan, sedangkan variabel terikat adalah kesejahteraan sosial ekonomi KPM. Maka dari itu, penelitian ini tidak membahas variabel lain di luar bantuan dan pendampingan PKH. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup wilayah Kelurahan Sendang agar hasil penelitian lebih terfokus dan mendalam. Periode penelitian ditetapkan pada tahun akademik 2025/2026 agar hasil yang diperoleh menggambarkan kondisi aktual pada masa tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, rumusan pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon?
2. Apakah Pendampingan Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon?
3. Apakah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pendampingan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pendampingan Secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan pengetahuan, khususnya di ranah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Baik penulis maupun pembaca dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai sumber informasi tambahan mengenai bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan yang diberikan telah memengaruhi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat penerima manfaat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian lapangan. Selain itu, menjadi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan evaluasi bagi lembaga terkait dalam menilai efektivitas program yang telah

dilaksanakan, serta sebagai pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menambah kumpulan referensi dan literatur bagi para peneliti di masa mendatang yang tertarik untuk meneliti topik-topik terkait. Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain atau memperluas wilayah kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk membantu pembaca memahami isi penelitian serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan. Berikut ini adalah susunan tulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini memaparkan secara umum permasalahan penelitian, meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini memaparkan landasan teoritis, yang mencakup kajian teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini membahas metode penelitian, termasuk waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini menguraikan hasil pengujian deskriptif, pengujian hipotesis terhadap objek penelitian, analisis data, serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN: Bab ini mengkaji kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang diperoleh serta saran yang diajukan berdasarkan keseluruhan hasil penelitian.